

PERAN DINAS PPKB DAN PPPA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN JOMBANG

Atika Dwi Arianti

16040254086 (PPKn, FISH, UNESA) ariantiatika3@gmail.com

Rr. Nanik Setyowati

0025086704 (PPKn, FISH, UNESA) naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan faktor penghambat dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan adalah teori peran Biddle dan Thomas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dipilih secara purposive sampling adalah Kepala Bagian Perlindungan Anak. Fokus penelitian adalah peran dan faktor penghambat dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak terlihat dari sosialisasi kekerasan seksual terhadap masyarakat, pemberian layanan pengaduan, pendampingan kepada korban ketika melaporkan kasus secara hukum dan pendampingan secara psikologis korban. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki pola pikir tentang kekerasan seksual yang masih rendah, kurangnya pendidikan seks kepada anak dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, Anak, masyarakat

Abstract

The purpose of this study is to describe the role and inhibiting factors of the departement women's empowerment and child protection in overcoming child sexual violence in Jombang. The theory used is the theory of the role of Biddle and Thomas. The type research used is descriptive qualitative research. The data collection techninques using indepth interviews with research informants selected by purposive sampling are the head of the chlid protection departement. The focus of the research is the role and inhibiting factors of the departement women's empowerment and child protection in overcoming child sexual violence in Jombang. The results showed thatbthe role of the of the departement women's empowerment and child protection in overcoming child sexual violence can be seen from the socialization of sexual violence against the community, the provision of complaints services, assistance to victums when reporting cases legally and psychological assistance to victims. This happenes because the society still has a mindset about sexual violence that is still low, lack of sex education in children and lack of publick awareness to report sexual violence.

Keywords: sexual violence, child, society

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional sehingga memerlukan perlindungan dan pembinaan (Kartono, 2004:35). Aset tersebut haruslah dirawat dan dilindungi oleh orang tua dari masa anak itu kecil lalu hingga dewasa agar cita-cita bangsa terpenuhi. Orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak agar anak tumbuh dan kembang. Suatu bentuk perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada anak dapat tumbuh, berkembang secara fisik maupun mental dengan baik harus mendapatkan perlindungan dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial yang dapat membentuk kepribadian anak hingga usia dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial harus mendapatkan perlindungan yang

maksimal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat dalam proses interaksi yang dilakukannya.

Usia 18 tahun merupakan batas usia anak yang berdasarkan pertimbangan fase-fase perkembangan fisik dan psikologis manusia. Menurut Hurlock (1978: 113) fase perkembangan fisik atau biologis terdiri dari fase prenatal (sebelum lahir), fase infancy (usia 14 hari), fase baby hood (2 minggu - 2 tahun), fase childhood (2 tahun sampai masa pubertas), dan fase adolescence (11 tahun – 17 tahun). Berdasarkan tahapan perkembangan fisik dan psikologis manusia, anak mengalami perkembangan secara bertahap dan saling berhubungan dimana perubahan terjadi kearah kematangan berpikir dan bertindak (Hurlock, 1978: 174). Setiap anak dalam fase perkembangannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi

anak dan lingkungan memiliki pengaruh dalam sesuai atau tidak tahapan perkembangan anak.

Hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pengetahuan, dan pembentukan kepribadian yang selanjutnya akan di sempurnakan dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan, pembentukan karakter dan masa depan anak. Keluarga berhak atas kelangsungan hidup anak, pertumbuhan, dan perkembangan anak dari keluarga tersebut. Akhirnya perhatian kepada anak yang diberikan oleh keluarga maupun orang tua akan menciptakan anak yang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal yang akan siap berpartisipasi dalam masyarakat suatu bangsa demi mewujudkan cita-cita bangsa

Keutuhan dan kerukunan di dalam lingkungan keluarga merupakan dambaan semua anak karena di sana mereka akan merasakan kasih sayang yang seutuhnya oleh karena itu untuk mewujudkannya tergantung pada setiap orang. Kualitas perilaku dan pengendalian diri jika tidak dapat dikontrol dengan baik maka akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Konflik di dalam keluarga akan selalu ada namun yang membedakan yaitu bagaimana cara mengatasinya dan menyelesaikan hal tersebut tanpa menjadikan anak sebagai korban di dalam konflik tersebut,

Kenakalan anak juga sering menjadikan penyebab kemarahan orang tua sehingga anak mendapatkan hukuman disertai dengan emosi dengan kekerasan, Bila hal tersebut sering dialami anak di dalam lingkungan keluarga maka akan menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya sehingga akan menimbulkan kebencian. Ketika anak memiliki rasa benci kepada keluarga maka hal tersebut akan rawan terhadap pertumbuhan anak dimasa dan terbentuknya kepribadian yang tidak sehat

Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada PBB pada tahun 1989 terdapat 10 hak yang harus diberikan kepada anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan (republika.co.id, diakses 10 Mei 2020). Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual (Noviana, 2015:14).

Dalam lingkungan masyarakat, kekerasan terhadap anak masih dapat terjadi dimanapun terutama kekerasan seksual. Anak sering menjadi korban kekerasan seksual

dianggap lemah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebagian besar pelaku adalah orang dekat dengan anak dan memiliki dominasi terhadap anak seperti orangtua dan guru. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan atau laki-laki tidak dapat dibiarkan terjadi. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran moral dan hukum dan perlu diberikan hukuman yang berat.

Kekerasan seksual pada anak merupakan segala bentuk ancaman atau paksaan yang dilakukan kepada anak kearah perilaku seksual yang dilakukan oleh orang lain (Noviana, 2015:18). Menurut catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 dari Komnas Perempuan terdapat 770 kasus anak perempuan mengalami hubungan inses (hubungan seksual satu darah) dan 571 mengalami kekerasan seksual (CNN Indonesia News, diakses 13 Juli 2020). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pelaku hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, misal- nya saudara, kakek bahkan ayah kandung korban. Kekerasan seksual dan kekerasan anak akan memberikan dampak traumatis yang berkepanjangan (Utami, 2018:2). Kasus kekerasan seksual kepada anak yang terjadi di Indonesia, sebagian besar anak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain terhadap dirinya karena adanya tekanan dan ancaman yang diberikannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, memperjelas bahwasannya perlu pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama pada kejahatan atau kekerasan seksual pada anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali, serta dapat mendorong anak tersebut untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak yang sudah di rusak dan dicerai oleh pelaku kekerasan seksual.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan pengembangan Pusat Layanan Terpadu, Yang termasuk kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk didalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana. Hal tersebut disesuaikan pada Undang-undang otonomi Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengenai peraturan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah daerah.

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) anak di Kabupaten Jombang merupakan dinas yang dulunya tidak jadi satu tetapi pemerintah pusat

yang mewajibkan kota atau kabupaten merampingkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang.

Permasalahan kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan serius yang saat ini dihadapi oleh Bangsa Indonesia yang terjadi di semua provinsi termasuk kota Jombang. Kasus tersebut marak dan sangat memprihatinkan karena merusak fisik dan jiwa anak, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak walaupun tidak dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*Statutory rape*). Anak yang berurusan dengan hukum wajib diberikan perlindungan sehingga dapat mengikuti segala prosedur hukum yang dialaminya (Herlina, 2017: 18).

Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 mencapai 56 kasus yang terdiri dari kasus pelecehan seksual, persetubuhan, pemeriksaan dan pencabulan. Dalam kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang melakukan pendampingan kasus kekerasan seksual anak. Faktor yang menyebabkan banyak kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang anak belum dapat mengontrolnya, orang tua kurang memberikan pengawasan kepada anak. Berikut data kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang sebagai berikut.

Tabel 1 kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang Tahun 2019

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pelecehan Seksual	2
2.	Persetubuhan	25
3.	Pemeriksaan	4
4.	Pencabulan	20
Jumlah		56

Sumber : Rekap Kasus (T2P2A) Jombang tahun 2019

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Jombang masih tergolong tinggi. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual anak berupa pengalaman traumatis, depresi, sulit bersosialisasi dengan orang luar. Pada anak yang mengalami kekerasan seksual bisa mengalami gejala kejiwaan tergantung pada kepekaan anak, cacat yang ditinggalkan dan macam dari penganiayaannya, usia anak, dan hubungan secara menyeluruh antara anak dan pelaku. Gejala depresi menjadi dampak yang paling umum terjadi kepada anak yang mengalami kekerasan seksual. Dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual perlu penanganan yang serius dan melibatkan semua pihak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu upaya atau tindakan yang dilakukan baik secara terencana atau tidak terencana oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak berumur kurang dari 18 tahun yang berakibat menimbulkan rasa sakit, cedera, trauma bahkan kematian pada korban. Kekerasan seksual sendiri umumnya dilakukan oleh pihak yang berumur beberapa tahun lebih tua dari korban. Tindakan ini biasanya dilakukan secara paksa dan disertai ancaman kepada korbannya (Chasmore, 2013:4). Pengaruh globalisasi sosial budaya pada era teknologi informasi dan komunikasi yang paling rentan adalah remaja, sebab remaja bisa mengakses sumber dari internet dan sebagainya secara langsung. Bila permasalahan ini tidak dikondisikan dengan baik dan benar bisa menimbulkan perilaku yang menyimpang (Indratmoko, 2017:122).

Kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian dan cenderung dirahasiakan oleh korban. Korban mengalami ketakutan untuk melaporkan karena merasa malu hal tersebut merupakan aib yang harus disembunyikan atau korban takut dengan ancaman dari pelaku. Kekerasan seksual menjadikan anak mengalami depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang lama dan korban yang mengalami trauma psikologis yang berat kemungkinan akan merasakan dorongan untuk bunuh diri (Ningsih, 2018:58).

Teori Peran Biddle dan Thomas digunakan dalam penelitian ini. Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu (Sarwono, 2010:215). Menurut Biddle dan Thomas teori peran diistilahkan menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku dan kaitan antara orang dan perilaku. Terdapat empat istilah “perlaku” yang disampaikan oleh Biddle dan Thomas yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi.

Dalam penelitian ini, harapan yang diberikan orang lain terhadap seseorang yang memiliki peran yaitu dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang berharap bahwa dinas PPKB dan PPPA selalu melakukan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan bantuan seperti layanan advokasi, pendampingan psikologis dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Norma memiliki peran sebagai petunjuk atau pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Melalui norma kehidupan akan sesuai antara hak dan kewajiban semua masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan tugas sampai akhir, sehingga tanggung jawab merupakan sebagian dari norma.

Menurut Biddle dan Thomas norma merupakan sebuah bentuk dari harapan. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan anak guna memberikan hak-hak kepada anak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor atau seseorang yang menampilkan wujud perilakunya yang berbeda-beda. Peran dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang diwujudkan melalui aktivitas dari wujud perilaku tanggung jawab. Aktivitas dinas PPKB dan PPPA berupa pendampingan korban ketika melaporkan kasus ke kepolisian, memberikan penyembuhan secara psikologis dan fisik korban kekerasan seksual. Hal tersebut termasuk salah satu wujud perilaku tanggung jawab dinas PPKB dan PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Dinas PPKB dan PPPA memiliki peran “pelindung” bagi korban kekerasan seksual anak. Peran sebagai “pelindung” dilakukan ketika lingkungan terdekat korban kekerasan seksual tidak memberikan dukungan secara jasmani dan rohani. Peran tersebut dimulai dari pemberian layanan pengaduan, pemberian layanan advokasi kepada korban dan pendampingan secara psikologis korban. Meskipun peran “pelindung” dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak masih mengalami berbagai hambatan tidak membuat dinas mengurangi peranannya tersebut.

Penilaian dan sanksi menurut Biddle dan Thomas merupakan bagian dari harapan dari masyarakat terkait norma yang berlaku. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle & Thomas dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Apabila penilaian dan sanksi muncul dari luar (eksternal) penilaian dan sanksi terhadap peran akan ditetapkan oleh perilaku orang lain. Kemudian apabila penilaian dan sanksi muncul dari dalam (internal) maka pelakunya lah yang mampu menilai serta merubah nilai – nilai yang sesuai harapan dan norma – norma didalam masyarakat.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Alasan memilih pendekatan penelitian kualitatif ingin mencari dan memahami data mengenai peran Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang dan faktor- faktor penghambat peran Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB), pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) yang berada di Jln Presiden KH.Abdurrahman Wahid No 161, Candimulyo Kec. Jombang Kab. Jombang. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang merupakan dua badan yang mengalami perampingan birokrasi sehingga menjadi satu badan. Tetapi kedua badan memiliki peran berbeda dinas PPKB memiliki fokus dalam penanganan keluarga berencana, sedangkan dinas PPPA fokus dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alasan Penelitian dilakukan karena Dinas PPPA tersebut menangani kasus kekerasan serta menjadi perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang berada di Kabupaten Jombang mendapatkan tindakan kekerasan.

Pada penelitian ini, Teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono 2015:299). Pengambilan informan pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu paham mengenai peran dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Subjek dari penelitian adalah Kepala bagian perlindungan anak Kabupaten Jombang. subjek dipilih karena dalam penelitian ini memerlukan informasi yang sangat mendalam sehingga diperlukan informan-informan yang mengetahui tentang peran dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual anak dan faktor penghambat dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Fokus dalam penelitian ini adalah peran dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual anak dan faktor penghambat dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Dalam kegiatan wawancara dibutuhkan terkait dengan peran dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak dan faktor penghambat dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Kegiatan wawancara mendalam dilakukan melalui via telepon karena situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung dengan informan. Teknik analisis data model Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada kepala dinas Kepala bagian

perlindungan anak PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang memperingkas dan membuang hal yang tidak diperlukan tidak sesuai fokus. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses pengolahan data. Penyajian data disajikan berupa teks naratif yakni peran dan faktor penghambat dinas PPKB dan PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Huberman, 2007: 84)

Data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis kemudian disimpulkan sementara. Penarikan kesimpulan sementara ini dapat berubah hasilnya apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang akurat (Sugiyono 2015:354). Menurut Moleong (2014:320) bahwa keabsahan data merupakan keadaan dimana harus terpenuhinya beberapa kriteria antara lain yakni *Pertama* data penelitian harus mendemonstrasikan nilai-nilai yang benar, *Kedua* mempunyai dasar agar hal yang diuji dapat diterapkan, dan *Ketiga* memperbolehkan keputusan lain yang dapat dipakai terkait konsistensi dari prosedur serta kenetralan temuan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang, sehingga diperoleh hasil wawancara terkait peran dinas PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang yaitu sosialisasi kekerasan seksual kepada masyarakat, pemberian layanan pengaduan, pendampingan kepada korban dalam menyelesaikan kasus secara hukum, dan pendampingan secara psikologis kepada korban.

Sosialisasi Kekerasan seksual kepada masyarakat

Kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 yang lumayan tinggi dengan jumlah 56 kasus memberikan gambaran bahwa masih banyak kekerasan seksual anak yang terjadi. Dinas PPPA Kabupaten Jombang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait kasus kekerasan seksual anak. Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PPPA Kabupaten Jombang guna mencegah kekerasan seksual anak dilakukan kesemua sektor masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan ibu Karomah.

“...sosialisasi yang kami lakukan untuk mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang harus melibatkan semua pihak agar sosialisasi yang kami lakukan berhasil sesuai dengan tujuan awal. Sosialisasi yang kami lakukan biasanya di desa-desa untuk diberikan pelatihan bagi ibu-ibu dalam pelatihan keluarga berencana biasanya kami sampaikan sosialisasi terkait bahayanya kekerasan seksual anak yang berpenaruh kepribadian anak sehingga keluarga dapat menjaga bahkan melindungi anak-anaknya” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Sosialisasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh dinas PPPA Kabupaten Jombang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan seksual anak. Meskipun demikian masih banyak masyarakat yang masih belum peduli bahkan membiarkan terkait kekerasan seksual anak terjadi. Padahal hal tersebut akan memberikan peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sosialisasi yang dilakukan dinas PPPA sangat penting untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang karena pada tahun 2019 hampir sebagian besar kasus kekerasan seksual anak terjadi dilingkungan terdekatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“...untuk masalah sosialisasi ini memang diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya kekerasan seksual anak terhadap masa depan anak. Kami akhir-akhir ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan langsung bekerja sama dengan pemerintah desa. Kegiatan sosialisasi kekerasan seksual anak biasanya bareng dengan kegiatan penyuluhan program keluarga berencana. Pada tahun 2019 di Kabupaten Jombang sebagian kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang terdekat korban sehingga kami memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi kepada semua masyarakat terutama keluarga yang masih belum peduli dengan kekerasan seksual anak.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Dinas PPPA Kabupaten Jombang dalam melakukan sosialisasi terkait perlindungan anak khususnya terkait kekerasan seksual anak memang semakin gencar dilakukan bahkan pada tanggal 7 Agustus 2019 terbentuk forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) merupakan wadah berkumpulnya berbagai bidang yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi kemasyarakatan, keagamaan, akademisi dan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Tujuan terbentuknya forum PUSPA adalah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia dan mengakhiri

kesenjangan ekonomi terhadap perempuan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“...kemarin pada tahun 2019, pemerintah daerah membentuk Forum PUSPA yang merupakan upaya dari pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terkait dengan kekerasan seksual anak.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga melibatkan sekolah-sekolah agar peserta didik memahami bahwa kekerasan seksual memberikan dampak yang sangat buruk bagi masa depan anak. Kegiatan yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam rangka sosialisasi kekerasan seksual dilingkungan sekolah, desa dan perkotaan yang sasarannya adalah para remaja. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan advokasi KIE (Komunikasi Informasi Elektronik) tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan PUP. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjamin pemenuhan hak seksual dan kesehatan reproduksi remaja yang membutuhkan upaya secara terpadu dan lintas sektor dalam pemberian informasi kesehatan reproduksi dalam berbagai bentuk sedini mungkin kepada remaja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Karomah.

“...terdapat kegiatan advokasi KIE tentang kesehatan reproduksi remaja dilakukan terhadap para remaja yang ada di perkotaan dan pedesaan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan mampu memberikan pilihan kepada remaja untuk melakukan tindakan secara bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. kegiatan adovakasi KIE dilaksanakan di 21 kecamatan dan 42 sekolah dan para peserta berasal dari remaja dengan usia minimal 10 tahun sampai 22 tahun yang belum menikah.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Dinas PPPA melakukan sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat yang sudah berkeluarga karena memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual anak karena keluarga menjadi pelindung anak dari berbagai macam tindakan yang mengancam anak. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi tanpa melihat waktu dan tempat sehingga keluarga mempunyai peran dalam melindungi anak dari ancaman tindakan kekerasan seksual. Fakta yang terjadi bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban. Sosialisasi kekerasan seksual terhadap anak kepada masyarakat bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dampak dari kekerasan seksual kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan ibu Karomah.

“...yang terjadi di masyarakat masih banyak orangtua menganggap pelecehan seksual menjadi hal wajar karena pelakunya masih memiliki ikatan

keluarga dengan korban dan hal tersebut dianggap sebagai rasa kasih sayang kepada anaknya. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang bahaya kekerasan seksual kepada anak dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Sosialisai terkait kekerasan seksual kepada masyarakat sangat di perlukan dalam upaya mecegah kekerasan seksual anak terjadi. Masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan seksual anak ketika melakukan hubungan badan dengan pelaku. Sosialisasi kepada masyarakat terkait untuk mencegah kekerasan seksual anak terjadi di lingkungan terdekat dan memberikan pengertian kepada masyarakat ketika mengetahui kekerasan seksual dapat melaporkan kepada dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang.

Pemberian Layanan Pengaduan

Pemberian layanan pengaduan kepada masyarakat terkait kekerasan seksual anak. layanan pengaduan ini memberikan akses kepada masyarakat untuk segera melapor apabila terjadi kekerasan seksual anak dilingkungan terdekatnya. Layanan pengaduan terkait kekerasan seksual anak dapat diakses melalui dua cara yaitu *online* atau *offline*. Layanan *online* bisa diakses melalui email pengaduan@sippeka.com dan telpon 081217773100 yang dapat dilihat di web resmi Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk layanan pengaduan secara *offline* dapat langsung datang ke kantor dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang yang berada di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.161. hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“...dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang juga memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat ketika mendapatkan kekerasan seksual. Layanan pengaduan tersebut dapat diakses melalui cara *online* atau datang langsung kesini mbak. Untuk layanan *online* bisa melalui email yang terdapat diweb resmi pemerintah Kabupaten Jombang. Tetapi kebanyakan masyarakat ketika melaporkan kekerasan seksual langsung datang kesini. Layanan *online* jarang digunakan karena masyarakat tidak mengetahui bahwa dinas membuka layanan pengaduan secara *online* melauai email atau telepon yang tersedia. Layanan pengaduan *online* hanya berlaku ketika jam kerja akan dapat dilayani.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Layanan pengaduan secara *online* yang diberikan kepada masyarakat mengalami beberapa kendala terutama masyarakat yang lebih memilih melakukan pengaduan secara langsung ke dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Pengaduan secara langsung bertujuan untuk memverifikasi identitas korban dan melakukan tatap muka kepada pegawai dinas PPPA Kabupaten Jombang untuk melakukan klarifikasi kasus dengan pendekatan langsung

kepada korban. Selain itu korban atau keluarga harus memiliki identitas yang jelas agar dapat mempermudah dinas melakukan verifikasi data korban. Sebagaimana yang disampaikan ibu Karomah.

“...masyarakat yang datang kesini untuk melaporkan kekerasan seksual harus membawa identitas lengkap yang bertujuan untuk verifikasi data. Selain itu, keluarga atau pengantar korban harus mengisi biodata korban untuk kepentingan penanganan kasus. Setelah itu korban akan diajak oleh pegawai kami untuk melakukan klarifikasi kasus yang ditemani oleh keluarga atau dilakukan secara individu. Tujuannya untuk melakukan pendekatan kepada korban agar dapat mengurangi rasa trauma yang ada.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Layanan pengaduan kekerasan seksual kepada anak memang menjadi langkah yang harus dilakukan masyarakat agar kekerasan seksual anak dapat dicegah atau berkurang. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual akan membuat perlindungan kepada anak terkait tindak kekerasan seksual. Tahapan yang dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang setelah korban memberikan klarifikasi kasus adalah memberikan penanganan apabila korban membutuhkan bantuan hukum.

Pendampingan kepada korban ketika melaporkan kasus kekerasan seksual secara hukum

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan yang dapat merusak masa depan anak. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang menjadi layanan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian pendampingan kepada korban kekerasan seksual supaya korban kekerasan seksual anak tidak mengalami ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi ke kepolisian. Hal ini disampaikan oleh ibu Karomah selaku kepala Bidang Perlindungan Anak.

“...ketika kasus kekerasan seksual anak harus berurusan dengan kepolisian kami memberikan pendampingan kepada korban untuk melaporkan ke kepolisian. Tetapi hak melaporkan kasus kekerasan ke kepolisian menjadi hak korban kekerasan seksual, ketika korban tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual ke kepolisian maka kami tidak berhak untuk memaksa korban untuk segera melaporkan kasus tersebut. Selain itu kebanyakan korban kekerasan seksual merasa takut untuk melaporkan atau menceritakan kejadian tersebut sehingga kami memberikan pendampingan kepada korban ketika bersedia untuk melaporkan kasus ke kepolisian” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Korban kekerasan seksual mengalami ketakutan ketika ingin melaporkan kasus ke kepolisian sehingga dinas PPKB

dan PPPA Kabupaten Jombang memberikan pendampingan kepada korban. Anak memiliki yang mengalami kekerasan seksual harus membutuhkan penanganan secara khusus terutama dalam hal penanganan secara hukum. Pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak dalam melaporkan kasus secara hukum, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan LBH atau LSM yang sangat serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Hal ini disampaikan oleh ibu Karomah selaku kepala Bagian Perlindungan Anak.

“...dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam pendampingan hukum tidak bisa ikut campur secara langsung karena kami bukan lembaga bantuan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual sehingga kami bersinergi dengan beberapa LBH atau LSM dalam pendampingan kasus kekerasan seksual seperti *Women's Crisis Center* (WCC) jombang dan masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa dinas PPKB dan PPPA ini merupakan lembaga bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual dan memberikan bantuan berupa pendampingan apabila korban ingin melaporkan kasusnya ke kepolisian karena dinas PPKB dan PPPA lebih kearah pendampingan psikologis korban” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mendampingi korban kekerasan seksual anak sangat penting dilakukan agar anak yang mengalami kekerasan seksual tidak mengalami depresi atau trauma yang sangat besar dan dapat membuat keadaan anak akan terpuruk. Pemberian layanan advokasi berupa pendampingan dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA mulai dari korban berani menceritakan kekerasan seksual yang terjadi. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak dilakukan mulai dari awal terjadi kasus sampai berakhirnya kasus. Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak bertujuan untuk memberikan dorongan moral agar dapat menjalankan kehidupannya secara normal kembali. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Karomah selaku ketua Bidang Perlindungan Anak.

“...pelayanan yang diberikan kepada korban dilakukan dari awal korban mau melapor kesini mbak. Ketika korban melapor telah mengalami kekerasan seksual kami langsung menugaskan pegawai kami untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarga agar dapat menceritakan kekerasan seksual. Gini mbak kebanyakan anak yang telah mengalami kekerasan seksual itu takut untuk menceritakan apa yang telah dialami sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap mental korban kekerasan. Dalam pendampingan tersebut nanti pegawai kami akan memberikan pilihan kepada korban untuk melanjutkan kasus kekerasan keranah hukum atau

tidak. Ketika korban bersedia kasus dilanjutkan keranah hukum dinas PPKB dan PPPA akan berkerjasama dengan WCC Jombang untuk membantu proses hukum sampai selesai.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Selama pendampingan kasus diranah hukum, Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang melakukan kunjungan ke kediaman korban untuk memberikan pelayanan secara psikologis agar rasa trauma korban kekerasan seksual dapat hilang. Adapaun fokus dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam menangani kasus kekerasan sekusal anak adalah melakukan pendampingan secara psikologis bukan pendampingan secara hukum. Dinas PPKB dan PPPA bukan lembaga bantuan hukum sehingga sering menggandeng LSM atau LBH untuk proses pendampingan kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang secara hukum.

Pendampingan kearah psikologis korban

Pendampingan kearah psikologis dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA kepada korban kekerasan seksual anak dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dijalani. Tahapan awal yang dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA melakukan kunjungan ke kediaman korban untuk melihat kondisi mental korban apakah terjadi gejala-gejala mengalami traumatis yang berat. Kunjungan awal dilakukan selama seminggu sekali untuk melihat secara rutin kondisi korban dan keluarga. Selain itu, dinas PPKB dan PPPA melakukan koordinasi dengan pihak RT atau RW setempat untuk melakukan pengawasan kepada korban kekerasan seksual.

Tahapan selanjutnya setelah melakukan kunjungan secara rutin seminggu sekali dan korban menunjukkan mengalami gejala-gejala traumtis dinas PPKB dan PPPA akan melakukan tindakan lebih lanjut. Gejala-gejala traumatis yang ditimbulkan dari korban kekerasan seksual mulai dari sedih, mengurung diri, takut bertemu dengan orang, dan tidak nafsu makan Tindakan yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA ketika korban menunjukkan mengalami gejala trauma akan diantar ke psikolog/psikiater apabila mengalami trauma fisik, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang akan melakukan pengobatan secara medis. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Karomah

“...proses pendampingan secara psikologis kepada korban harus dilihat kondisi korban telah mengalami trauma berat maka akan berikan bantuan berupa pendampingan ke psikolog/psikiater untuk menyembuhkan rasa traumatis dari koban. Meskipun demikian harus ada persetujuan dari keluarga dan korban agar bersedia untuk ke psikolog/psikiater. Selain itu terdapat korban kekerasan seksual yang mengalami trauma fisik sehingga dibutuhkan perawatan secara medis untuk mengobati trauma fisik. Sejauh ini kebanyakan

korban mengalamii trauma secara psikologis karena kekerasan seksual yang dialami. Trauma psikologis yang sering terjadi adalah korban sering mengurung diri, dan takut untuk ketemu dengan orang baru” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan menjadi hal penting dalam proses penyembuhan traumatis dari korban kekerasan seksual anak. Korban kekerasan akan mengalami rasa traumatis yang berat ketika tidak ada pendampingan dari pihak-pihak terkait. Keluarga memiliki peran penting dalam fase penyembuhan trauma korban kekerasan. Selain itu, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam pendampingan secara psikologis bertujuan untuk menghilangkan pikiran dan perasaan korban kekerasan seksual anak yang dapat memperburuk traumanya.

Peristiwa kekerasan seksual anak akan membuat anak memiliki kepribadian yang berbeda sebelum terjadinya kekerasan seksual. Hal tersebut membuat dinas PPKB dan PPPA memberikan bantuan berupa trauma healing yang dilakukan setiap melakukan kunjungan ke kediaman korban kekerasan. Tujuannya untuk mengembalikan kepercayaan diri anak untuk dapat hidup seperti biasanya. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“...upaya yang kami lakukakn untuk menumbuhkan kepercayaan korban memang membutuhkan usaha yang serius mbak, apalagi korban sudah mengalami trauma yang cukup berat. Pendampingan ke psikolog/psikiater saja masih tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan korban berupa memberikan dorongan moral, memberikan contoh orang yang bisa bangkit dan menata masa depan dengan kasus kekerasan seksual. Hal tersebut kami lakukan agar anak yang mengalami kasus kekerasan akan merasa bahwa terdapat masalah yang sama dengan dirinya tetapi masih bisa melanjutkan hidupnya” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Anak-anak yang mengalami korban kekerasan seksual memiliki permasalahan yang sangat komplks dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengembalikan kondisi korban seperti semula. Trauma yang ditimbulkan oleh korban bermacam-macam sehingga perlu penanganan yang sesuai dengan gejala yang dimunculkan. Anak korban kekerasan seksal yang masih di bawah 14 tahun akan mengalami rasa ketakutan untuk bertemu dengan orang baru, karena itu pendampingan terhadap mereka dilakukan melalui konseling secara khusus.

Trauma korban yang takut bertemu dengan orang baru memberikan sedikit kesulitan bagi pegawai dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang yang melakukan kunjungan rutin ke kediaman korban atau ketika korban melaporkan kasusnya ke dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Strategi yang dilakukan agar korban tidak takut bertemu

dengan orang baru melalui pendekatan konseling. Hal tersebut bertujuan untuk membuat anak tidak tertekan dan takut untuk menceritakan kekerasan seksual yang terjadi karena anak akan sulit untuk diajak berkomunikasi. Sebagaimana yang disampaikan ibu Karomah.

“...anak yang mengalami kekerasan seksual akan sulit untuk diajak komunikasi sama orang baru karena adanya rasa takut untuk bertemu dengan orang lain. Strategi yang kami lakukan adalah dengan melakukan proses konseling yang dilakukan secara pribadi sehingga korban merasa sedikit nyaman dengan suasana agar dapat menceritakan secara detail kejadian kekerasasn seksual yang dialami. Proses konseling belum tentu dapat membuat korban untuk dapat berkomunikasi atau bahkan menceritakan kejadian yang dialaminya. Mulai dari memberikan suasana baru dalam berkomunikasi, memberikan hal-hal yang disukai dan membiarkan korban melakukan hal-hal yang disukai ” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Pendampingan psikologis berupa konseling yang dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang menggunakan konseling traumatik. Konseling traumatik dilakukan kepada korban kekerasan seksual yang menunjukkan kondisi psikis yang buruk. Konseling traumatik dilakukan secara individu dengan suasana yang nyaman dengan durasi waktu minimal satu jam. Durasi berjalannya konseling traumatik bergantung dari kondisi psikologis korban. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan emosional yang dilakukan kepada anak-anak karena pendekatan emosional menjadi langkah yang efektif karena kondisi emosional anak korban kekerasan seksual masih labil. Pendekatan secara emosional harus dilakukan secara hati-hati karena ketika salah melakukan pendekatan kepada korban kekerasan seksual akan membuat korban tertutup dalam menceritakan kejadian yang dialaminya dan sulit untuk berinteraksi. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“....pendekatan secara emosional merupakan salah satu cara yang kami lakukan untuk mengobati traumas psikologis yang dialami korban. Trauma-trauma yang dialami anak berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak tersebut. Pendekatan secara emosional memberikan peluang anak untuk dapat menceritakan secara jujur terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Setelah korban selesai mendapatkan pendampingan secara psikologis korban akan diajak kembali kerumahnya dan apabila korban masih mengalami trauma berat korban akan disediakan rumah shelter.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Pendampingan psikologis dan pengobatan secara fisik memberikan bantuan kepada korban untuk mengurangi rasa trauma yang ada dipikirannya. Pendampingan psikologis mempunyai tujuan agar korban dapat beradaptasi kembali

dengan lingkungannya tanpa adanya rasa trauma yang dimilikinya. Meskipun demikian pendampingan psikologis tidak semuanya berhasil membuat anak beradaptasi dengan lingkungannya ketika anak korban kekerasan seksual mengalami trauma yang sangat berat dan masih belum bisa berinteraksi dengan lingkungan luar atau tempat asalnya dinas akan memberikan rumah singgah sementara berupa disediakan rumah shelter untuk para korban sampai rasa traumanya hilang dan korban siap untuk beradaptasi dengan lingkungan asalnya.

Faktor- faktor penghambat peran Dinas PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang

berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Anak ibu Karomah. Faktor penghambat dinas PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang yaitu: (1). pola pikir masyarakat tentang kekerasan seksual anak yang masih dianggap wajar, (2) kurangnya pendidikan seks kepada anak, (3) kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual.

Pola pikir masyarakat tentang kekerasan seksual anak yang masih rendah

Pola pikir masyarakat terkait kekerasan seksual anak yang masih dianggap wajar sulit untuk diubah. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berhubungan badan, melakukan tindakan dengan memegang area terlarang anak sudah termasuk pelecehan seksual. Masyarakat masih menganggap tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan kepada anak-anak masih dianggap wajar dan lumrah oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah

“....hambatan kita dalam masalah kekerasan seksual adalah pola fikir masyaarkat masih menganggap hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan tapi mereka berfikir hal tersebut merupakan hal yang wajar seperti mencium, memegang bokong, merabah anak. Mungkin masyarakat masing berfikiran bahwa hal tersebut wajar karena itu adalah kasih sayang untuk anak tersebut padahal tanpa disadari orang dewasa yang melakukan hal tersebut kita tidak tau apakah ada hasrat atau tidak ketika melakukannya” (wawancara tanggal 20 Mei 2020)

Masyarakat yang masih memiliki pola fikir sempit terhadap kekerasan seksual anak memberikan peluang untuk terjadinya kekerasan seksual. Masyarakat masih membiarkan tindakan-tindakan yang mengarah kearah pelecehan seksual kepada anak. Keluarga memiliki peranan penting dalam menjaga anak untuk menghindari berbagai macam tindakan kekerasan. Bahkan pelaku

kekerasan seksual itu sebagian besar berasal dari orang-orang terdekat korban. Pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki permasalahan orientasi seksual.

Masyarakat masih memiliki pemikiran bahwa pelecehan seksual itu hanya berhubungan badan. Pemikiran tersebut akan membuat kekerasan seksual akan tetap terjadi dikalangan masyarakat. Masih menjadi faktor penghambat yang sering dialami oleh dinas PPKB dan PPPA untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait kekerasan seksual. Oleh karena itu dinas PPKB dan PPPA sering melakukan sosialisasi terkait kekerasan seksual yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan ibu Karomah.

“...dilingkungan masyarakat masih berpikir bahwa pelecehan seksual itu hanya dilakukan dengan berhubungan badan padahal pelecehan seksual anak itu dilakukan dengan melakukan perilaku yang seksual yang dilakukan dengan anak. Masyarakat masih menganggap hal tersebut wajar dilakukan karena dianggap rasa sayang kepada anak. Padahal tindakan tersebut tidak boleh dilakukan sehingga pola pikir masyarakat masih sulit diubah. Sehingga kami sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terkait kekerasan seksual terhadap anak.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Butuh waktu yang lama dan upaya yang keras untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak. Pola pikir yang sudah tertanam sejak lama dimasyarakat sedikit membuat kekerasan seksual masih terjadi. Perubahan pola pikir masyarakat terkait kekerasan seksual anak apabila berhasil akan dapat mengurangi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Kurangnya pendidikan seks bagi anak

Pendidikan seks kepada anak sangat penting bagi pengetahuan anak terkait seks sehingga anak dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi pelecehan seksual anak. Pendidikan seks sangat penting untuk diberikan kepada anak sejak dini agar anak membuat perlindungan diri terkait tindakan pelecehan seksual. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan ibu Karomah.

“...faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya pendidikan seks kepada anak yang diberikan oleh orang tua. Padahal pendidikan seks sangat penting diberikan kepada anak sejak dini agar anak dapat mengetahui dan memahami tentang pendidikan seks. Pendidikan seks memiliki peranan penting untuk membuat anak dapat mengetahui apabila ada orang yang ingin melakukan kekerasan seksual kepada dirinya. Anak menjadi sasaran kekerasan seksual karena masih dianggap tidak memiliki pengetahuan tentang seks dan dengan mudah untuk dirayu oleh pelaku. Hal tersebut akan

berbeda apabila anak sudah mendapatkan pendidikan seks dari orang tua sejak dini.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Pendidikan seks masih menjadi hal tabu bagi masyarakat untuk dibicarakan kepada anak. Orang tua menjadi perlindungan pertama bagi anak dari berbagai tindakan kekerasan yang mengancam. Pendidikan seks sangat penting untuk diberikan kepada anak sehingga anak memiliki pengetahuan tentang pendidikan seks. Memang kesadaran orangtua terkait pendidikan seks menjadi kunci utama keberhasilan pengajaran pendidikan seks kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“...keluarga harus mulai membiasakan pendidikan seks kepada anak sebagai salah kontribusi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun hal tersebut dianggap hal yang tabu dalam masyarakat tetapi memiliki peran penting dalam pengetahuan anak terhadap seks. Perlu adanya kesadaran orangtua tentang kekerasan seks yang masih dianggap wajar terhadap masyarakat, orangtua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan anak.” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Lingkungan juga memiliki dampak dalam proses pendidikan seks kepada anak. Lingkungan yang masih menganggap perilaku seksual menjadi hal yang wajar menjadi salah satu penghambat dalam proses pendidikan seks kepada anak. Pendidikan seks harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat agar kekerasan seksual anak dapat dicegah. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya kesadaran orangtua dan masyarakat untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. Tujuan pendidikan seks tidak hanya membuat anak mengetahui pendidikan seks melainkan menjadi perlindungan anak terkait kekerasan seksual anak yang dapat mengancam masa depan anak

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan laporan kepada dinas PPKB dan PPPA kabupaten membuat jumlah kasus yang ada tidak bisa dipastikan dengan baik. Sikap masyarakat yang mengacuhkan kasus kekerasan seksual terhadap anak memang sudah menjadi rahasia umum. Alasan yang paling sering didengar dari masyarakat adalah keluarganya tidak mau berurusan dengan kepolisian atau pihak lainnya dan masyarakat percaya bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait kekerasan seksual menjadi sikap acuh dari masyarakat sulit

dihilangkan. Keluarga korban masih memiliki pemikiran untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarga ke kepolisian atau dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dan lebih memilih menutupi kasus tersebut disebabkan beberapa alasan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Karomah.

“....kesulitan yang sering kami temui adalah keluarga korban lebih memilih untuk menutupi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Apalagi pelakunya masih memiliki ikatan keluarga menjadi alasan yang membuat keluarga korban lebih memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang terjadi ke kepolisian atau ke dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Selain itu, terkadang orang terdekat atau masyarakat terdekat yg mengetahui tanda-tanda atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual mereka malah diam tidak ingin melaporkan masalah ini. Lebih menutupi dengan berbagai alasan, mungkin untuk keselamatan mereka ketika hal ini dilaporkan maka akan mendapatkan ancaman, berfikir juga agar masalah ini tidak berlarut panjang karena terkadang pelaku adalah kerabat mereka yg mengetahui, ada juga yg acuh karena menurutnya masalah tersebut tidak berpengaruh kedalam hidupnya”. (wawancara tanggal 9 April 2020).

Keterbukaan masalah kekerasan seksual merupakan langkah penting bagi dinas PPKB dan PPPA untuk mengatasi kekerasan seksual. Masalah utama dari tidak terbukanya keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan seksual adalah ketika pelakunya masih memiliki ikatan keluarga dengan korban. Pelaku kekerasan seksual yang sering dijumpai dimasyarakat adalah hampir sebagian besar adalah orang terdekat korban. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Karomah.

“...kekerasan seksual yang terjadi ada pelaku orang terdekat korban dan jangan salah mbak kekerasan seksual itu hampir 70% itu pelakunya adalah orang terdekat korban. bisa ayah kandung, ayah tiri, bahkan kerabat korban. sehingga kasus kekerasan seksual di Jombang masih cukup tinggi karena kami tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dari pelaku itu sendiri. Apalagi pelakunya adalah ayah kandung sendiri membuat ibu korban lebih memilih tidak melaporkan mohon maaf ya mbak karena ibu korban takut kalau suami dilaporkan nanti yang nafkahi siapa” (wawancara tanggal 20 Mei 2020).

Faktor yang membuat kekerasan seksual anak masih terjadi karena pola pikir masyarakat yang kurang memberikan kesadaran terkait kekerasan seksual sehingga ketidakterbukaan kasus masih terjadi. Ketidakterbukaan kasus yang dilakukan membuat dinas PPKB dan PPPA kesulitan mengetahui karena ada beberapa faktor sehingga mereka menyembunyikan jika ada tanda-tanda atau sudah adanya kekerasan seksual.

Pembahasan

Berdasarkan Konvensi Hak Anak pada PBB pada tahun 1989 terdapat 10 hak yang harus diberikan kepada anak salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan (republika.co.id, diakses 10 Mei 2020). Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual (Noviana, 2015:14).

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tentang perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan.

Tanggung jawab dan kewajiban yang terdapat pada UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan yang dijamin dari hal-hal yang mengancam kehidupannya bahkan menghilangkan hak-hak anak. Anak sangat rentan kehilangan hak-haknya karena secara jasmani dan rohani maupun sosial masih bergantung kepada orang lain.

Dalam pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana terdapat dalam pasal 21 UU No.35 tahun 2014 meliputi (a). Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, (b). negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak dan Pemerintah, berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, (c). Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Selain itu, masyarakat harus turut serta dalam pemberian perlindungan anak yang sudah diatur dalam pasal 25 UU No. 35 tahun 2014 yang meliputi (a). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dan (b). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Berdasarkan pasal 21 dan 25 UU No. 35 tahun 2014 bahwa perlindungan anak dari tindak kekerasan harus melibatkan kerja sama semua sektor dalam bangsa dan negara.

Kewajiban bagi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk memberikan. Bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan adalah melalui dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang. Perlindungan yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang adalah perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, perlindungan anak dari perdagangan manusia, dan perlindungan anak dari perbudakan. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang mengatakan pada tahun 2019 terdapat 56 kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Peran dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak merupakan upaya dari pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dinas PPKB dan PPPA bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kekerasan dan keadilan gender.

Peran merupakan proses dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2012:125). Seseorang dikatakan dapat menjalankan peran ketika dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak sesuai dengan teori peran dari Biddle dan Thomas. Sosialisasi yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang terkait kekerasan seksual memang membutuhkan upaya dan waktu yang cukup lama. Pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu hambatan yang dialami dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang.

Sosialisai terkait kekerasan seksual anak tidak hanya melibatkan masyarakat perkotaan melainkan sampai melakukan sosialisasi ke pedesaan. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang selalu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Hubungan baik ini memberikan peluang bagi dinas PPKB dan PPPA dalam memberikan edukasi terkait bahayanya kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih peduli terhadap kekerasan seksual yang terjadi dilingkungkannya. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan disekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Jombang. Sosialisasi disekolah juga memberikan peran penting dalam mengatasi kekerasan seksual anak. Peserta didik harus mengetahui bahwa kekerasan seksual tidak hanya berhubungan badan.

Pelecehan seksual dapat dilakukan dengan verbal, misalnya melakukan cat calling kepada wanita, memberikan komentar tentang bagian tubuh seseorang, menampilkan gambar yang berbau pornografi. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja ketika memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut.

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam menangani korban kasus kekerasan seksual yang mengalami trauma berat melakukan upaya lain selain diantar kepada psikolog atau psikiater untuk menyembuhkan trauma yang dialami. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang melakukan upaya lain Mulai dari layanan pengaduan, pemberian layanan advokasi, dan pendampingan secara psikologis korban.

Layanan pengaduan diberikan kepada korban kekerasan seksual anak dilakukan secara *online* dan *offline*. Layanan pengaduan yang diberikan dinas PPKB dan PPPA kabupaten memberikan kemudahan bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Layanan *online* bisa diakses melalui situs web resmi pemerintah daerah Kabupaten Jombang dan mengirimkan email pengaduan kekerasan seksual anak. Dalam layanan pengaduan secara *online*, korban harus melaporkan secara detail terkait kekerasan seksual yang dialaminya.

Layanan pengaduan secara *offline* yang diberikan dinas PPKB dan PPPA mendapatkan respon yang sangat baik oleh masyarakat. Masyarakat lebih antusias ketika melaporkan kekerasan seksual anak secara langsung. Pengaduan secara *offline* bisa langsung dilaksanakan di kantor dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang yang berada di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151. Tahapan yang harus dilakukan oleh korban ketika ingin melaporkan kekerasan seksual berupa membawa bukti-bukti yang dapat mengindikasikan terjaddinya kekerasan seksual dan korban akan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan terkait kekerasan seksual yang dialaminya secara pribadi dengan pegawai dinas.

Layanan pengaduan membuat dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang untuk dapat melakukan pendataan terkait kekerasan seksual anak. Pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual anak akan membuat dinas dapat melakukan upaya-upaya lain untuk mengatasi kekerasan seksual anak dan memberikan bantuan penyembuhan bagi korban kekerasan seksual anak. Korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma berat dan akan sulit untuk disembuhkan.

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dapat memberikan bantuan penyembuhan secara psikologis ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Berbeda halnya ketika korban tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami akan membuat kesulitan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang untuk mengidentifikasi korban tersebut.

Upaya selanjutnya adalah pemberian layanan advokasi kepada korban. Upaya ini berikan kepada korban kekerasan seksual ketika ingin melaporkan kasusnya kepada kepolisian. Dinas PPKB dan PPPA tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur kasus kekerasan anak apabila kasus tersebut dilaporkan kepada kepolisian. Apabila korban bersedia melaporkan kasus kekerasan seksual ke kepolisian, dinas PPKB dan PPPA akan mendampingi korban untuk menyelesaikan kasus keranah hukum.

Dinas PPKB dan PPPA akan melakukan kerja sama dengan badan bantuan hukum seperti LBH dan LSM yang fokus dalam penanganan perlindungan anak. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang akan melakukan kerja sama dengan WCC (*woman crisis center*) Jombang untuk mendampingi kasus kekerasan seksual anak sampai selesai. Dinas PPKB dan PPPA bukan lembaga bantuan hukum melainkan lembaga yang memberikan pendampingan secara psikologis kepada korban kekerasan seksual anak.

Layanan advokasi kepada korban mengalami beberapa hambatan yang sering dijumpai yaitu keluarga korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada kepolisian. Tindakan tersebut akan memberikan kebebasan kepada pelaku kekerasan seksual apabila tidak ada hukuman yang diberikan dari perilaku yang dilakukan. Alasan paling umum yang membuat keluarga korban enggan melaporkan kasus ke kepolisian adalah karena memiliki pemikiran ketika berurusan dengan kepolisian akan semakin sulit urusannya.

Pemikiran seperti tersebut salah dan tidak boleh dipertahankan oleh keluarga atau masyarakat. Negara sudah mengatur bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai tindakan kekerasan yang mengancam kehidupannya. Bahkan negara akan memberikan sanksi yang berat bagi pelaku yang mengancam merampas hak-hak anak sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014. Orang tua dari anak yang terlibat kenakalan remaja biasanya gagal dalam memberi penguatan pada perilaku positif anak di usia dini. Orang tua tersebut tidak terlibat secara positif terhadap perkembangan anak hingga beranjak remaja (Margaretha, 2012:2).

Masyarakat harus turut serta secara aktif dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Masyarakat menjadi elemen paling dasar dalam pencegahan kekerasan seksual. Masyarakat harus memiliki kesadaran terkait kekerasan atau tanda-tanda pelecehan seksual yang ada lingkungannya. Dinas PPKB dan PPPA kabupaten sering melakukan sosialisasi kesemua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual anak agar tidak terjadi. Masyarakat masih memiliki pikiran bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih hal yang wajar padahal dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya.

Upaya terakhir adalah pendampingan secara psikologis korban. Langkah menjadi upaya terakhir yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pada upaya ini diberikan kepada korban yang mengalami tanda-tanda munculnya trauma atau bahkan sudah mengalami trauma akibat kekerasan seksual yang dialami. Pendampingan secara psikologis menjadi kunci dalam proses penyembuhan dampak trauma yang dialaminya. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang akan mendeteksi korban yang telah mengalami trauma.

Dinas PPKB dan PPPA kabupaten melakukan identifikasi awal ketika korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya di dinas dan dinas dapat mengetahui bahwa korban mengalami trauma atau tidak. Selain itu, kunjungan ke kediaman korban merupakan salah satu cara identifikasi dinas PPKB dan PPPA dalam melakukan pendampingan secara psikologis korban. Korban yang mengalami trauma berat akan diantar ke psikolog atau psikiater untuk menyembuhkan trauma yang dialami dan mempersiapkan korban untuk kembali ke lingkungannya.

Korban yang telah melakukan penyembuhan psikis dan siap untuk kembali ke lingkungannya dinas PPKB dan PPPA akan mengantarkan secara langsung kepada keluarga. Sedangkan untuk korban yang telah melakukan penyembuhan psikisnya dan masih belum siap untuk kembali ke lingkungan asalnya, dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang mempersiapkan rumah sementara bagi korban kekerasan yaitu rumah shelter. Tujuan korban agar dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan diikuti pendampingan secara psikologis lanjutan untuk mengetahui keadaan psikologis korban apakah sudah siap untuk kembali ke lingkungan asalnya. Pendampingan secara psikologis korban membutuhkan waktu yang lama tergantung dari kondisi korban ketika mengalami kekerasan seksual tersebut.

Korban akan semakin sulit menyembuhkan traumanya apabila dalam pendampingan secara psikologis terdapat kesalahan yang membuat korban semakin tertutup dengan orang lain. Pendekatan secara emosional menjadi strategi yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA dalam menyembuhkan trauma korban. Pendampingan secara konseling menjadi salah satu strategi dalam proses penyembuhan trauma. Layanan konseling dilakukan dengan teknik konseling traumatik. Konseling traumatik memfokuskan korban untuk dapat membiasakan kehidupan yang baru setelah kejadian kekerasan seksual. Layanan konseling dilakukan dengan menggunakan cara memberikan korban suasana yang nyaman untuk bermain dengan kesukaannya. Berbagai upaya pendampingan secara psikologis yang dilakukan dinas PPKB dan PPPA kabupaten memiliki tujuan untuk menyembuhkan trauma

korban dan menyiapkan korban untuk menghadapi kehidupan dilingkungan asalnya.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang dapat mengubur masa depan korban. Korban Kekerasan seksual sebagian mengalami trauma yang berkepanjangan apabila tanpa ada penanganan lebih lanjut. Kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak fisik dan psikis korban. Dampak fisik dari kekerasan seksual adalah anak dapat mengalami luka dibagian tubuh sampai kehamilan. Sedangkan dampak psikis yang mengalami hanya korban karena tindakan tersebut dapat menyinggung langsung perasaan korban. dampak dari kekerasan seksual secara psikis terhadap anak yaitu anak akan mengalami perubahan perilaku dari biasanya, mengurung diri, takut bertemu dengan orang lain dll.

Peran dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak merupakan bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh dinas PPKB dan PPPA dalam teori peran Biddle dan Thomas merupakan *performance* (wujud perilaku) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam teori peran Biddle dan Thomas *performance* (wujud perilaku) dimaknai sebagai hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Biddle dan Thomas dalam teori perannya menjelaskan lima konsep tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yaitu *expectation* (harapan), *norm* (norma), *performance* (wujud perilaku), *evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi). Harapan tentang peran merupakan harapan yang diberikan oleh orang lain terkait perilaku yang sesuai dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. Dalam hal ini, dinas PPKB dan PPPA memberikan perlindungan anak dari berbagai tindakan kekerasan yang mengancam.

Dalam penelitian ini, harapan yang diberikan orang lain terhadap seseorang yang memiliki peran yaitu dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang berharap bahwa dinas PPKB dan PPPA selalu melakukan tugasnya sebagai lembaga yang memberikan bantuan seperti layanan advokasi, pendampingan psikologis dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Norma memiliki peran sebagai petunjuk atau pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Melalui norma kehidupan akan sesuai antara hak dan kewajiban semua masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan tugas sampai akhir, sehingga tanggung jawab merupakan sebagian dari norma. Menurut Biddle dan Thomas norma merupakan sebuah bentuk dari harapan. Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan anak guna

memberikan hak-hak kepada anak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor atau seseorang yang menampilkan wujud perilakunya yang berbeda-beda. Peran dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang diwujudkan melalui aktivitas dari wujud perilaku tanggung jawab. Aktivitas dinas PPKB dan PPPA berupa pendampingan korban ketika melaporkan kasus ke kepolisian, memberikan penyembuhan secara psikologis dan fisik korban kekerasan seksual. Hal tersebut termasuk salah satu wujud perilaku tanggung jawab dinas PPKB dan PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang.

Dinas PPKB dan PPPA memiliki peran “pelindung” bagi korban kekerasan seksual anak. Peran sebagai “pelindung” dilakukan ketika lingkungan terdekat korban kekerasan seksual tidak memberikan dukungan secara jasmani dan rohani. Peran tersebut dimulai dari pemberian layanan pengaduan, pemberian layanan advokasi kepada korban dan pendampingan secara psikologis korban. Meskipun peran “pelindung” dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Jombang dalam mengatasi kekerasan seksual anak masih mengalami berbagai hambatan tidak membuat dinas mengurangi perannya tersebut.

Penilaian dan sanksi menurut Biddle dan Thomas merupakan bagian dari harapan dari masyarakat terkait norma yang berlaku. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle & Thomas dapat datang dari orang lain (eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Apabila penilaian dan sanksi muncul dari luar (eksternal) penilaian dan sanksi terhadap peran akan ditetapkan oleh perilaku orang lain. Kemudian apabila penilaian dan sanksi muncul dari dalam (internal) maka pelakunya adalah yang mampu menilai serta mengubah nilai-nilai yang sesuai harapan dan norma-norma di dalam masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Peran dinas PPKB dan PPPA dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang terlihat dari sosialisasi kekerasan seksual terhadap masyarakat, pemberian layanan pengaduan, pendampingan kepada korban ketika melaporkan kasus secara hukum dan pendampingan secara psikologis korban. Hal ini terjadi karena masyarakat masih memiliki pola pikir tentang kekerasan yang masih rendah, kurangnya pendidikan seks kepada anak dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual.

Saran

Berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian, peran dinas PPKB dan PPPA dalam mengatasi kekerasan seksual masih terdapat kendala maka saran yang dapat diberikan

sebagai berikut. Bagi dinas PPKB dan PPPA diharapkan untuk tetap memperhatikan, melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan secara konsisten dan mengevaluasi layanan pengaduan yang dilakukan secara online karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aksesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Heri.dkk. 2018. Pendidikan Karakter Bagi Perilaku Pedofilia. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Vol.3 No.1. Hal 1-19
- Chasmore, J., and R. Shackel. 2013. The Long-Term Effects of Child Sexual Abuse. *CFCA Paper* No.11. Hal 1-19
- Herlina, Apong dkk. 2014. Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef
- Hidayati, N. 2014. Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekekrasan Seksual (Pedofilia). *Jurnal Semarang: Politeknik Negeri Semarang*
- Hubberman dan Milles. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Humaira, dkk. 2015. Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Perilaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*Vo.12, No.2. Hal 1-10
- Hurlock, Elizabeth. 1978. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Indratmoko, Agung. 2017. Pengaruh Globalisasi terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No.1 hal 122-133.
- Irfan, Muhammad dan Wahid. 2007. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan. Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama
- Kartono, Kartini. 2004. *Psikologi Apnormal*. Jakarta: Pradnya Pramitha,
- Margaretha & Nindya. 2012. “Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja”. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 1 No. 2 hal 1-9
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, dan Hennyati, Sri. 2018. Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karwang. *Midfife Journal* Vol. 2 No.2. Hal 56-60
- Noviana, I. 2015. Child Sexual Abuse : Impact and Hendling. *Jurnal Sosio Informa* Vol. 01, No.1. Hal 13-28
- Sarwono, Wirawan. 2010. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utami, Penny Naluria. 2018. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*. Vol. 9 No. 1 hal 1-17
- Wahyudhi, Dheny. 2015. “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.” *Jurnal Ilmu Hukum*. Hal 143-163.